

DAFTAR RUJUKAN

- Asshidiqie Jimly, 2011. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* Jakarta. Sinar Grafiks Alfabeta
- Artina, D., Indra, M., Firdaus, E., Gusliana, H. B., Zulwisman, Z., Rauf, M. A., & Akmal, Z. (2019, October). Penyuluhan hukum terkait partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan desa di Desa Koto Masjid Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar. In *Unri Conference Series: Community Engagement* (Vol. 1, pp. 590-597).
- Bihamding, H. (2019). *Perencanaan Pembangunan Partisipatif Desa*. Deepublish.
- Garna, Judistira. 2012. *Konsep-Konsep Perubahan Sosial*. Bandung: Program Pascasarjana Universitas Padjajaran.
- Hakim, L. (2017). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Sukamerta Kecamatan Rawamerta Kabupaten Karawang. *Jurnal Politikom Indonesiana*, 2(2), 43-53
- Hajar, S., Tanjung, I. S., & Tanjung, Y. (2018). *Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Pesisir*. Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah AQLI.
- Hamdi, Muchlis, 2015. *Perencanaan Partisipatif, Modul Badan Diklat Depagri*. Jakarta: Diklat Depagri-JICA
- Hermawan, Y., & Suryono, Y. (2016). Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan program-program pusat kegiatan belajar masyarakat Ngudi Kapinteran. *JPPM (Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat)*, 3(1), 97-108.
- Indrianasari, N.T (2017) Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. Studi Pada Desa Karang Sari Kecamatan Sukoharjo *ASSETS Jurnal Ilmiah ilmu Akuntansi Keuangan dan Pajak*. 1(2) 29-46
- Iswanto, (2020) Peraturan Desa Dan Kedudukannya Dalam Sistem Peraturan Dan Perundang Undangan Indonesia. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 4(2), 70-77
- Jalaludin, J. (2011). Hakikat Dan Fungsi Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Batu Uji Kritis Terhadap Gagasan Pembentukan Perda Yang Baik. *Aktualitas*, 6 (3). 29-46

- Marhum, U., & Meronda, M. (2021). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Desa Menurut Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014: Studi Kasus Desa Wawongsangula Kecamatan Puriala, Konawe, Sulawesi Tenggara. *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 2(12), 141-149.
- Moeloeng, 2005. *Metode Penelitian Kualitatif* Bandung. Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi, 2012. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Masyarakat Desa*. Jakarta: Nadi Pustaka.
- Mustanir, A., & Razak, M. R. R. (2017). Nilai Sosial Budaya Pada Partisipasi Masyarakat Etnik Towani Tolotang Dalam Musyawarah Rencana Pembangunan. *Prosiding Konferensi Nasional Ke-6 Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyiyah (APPPTMA)*, 4(2), 1-7.
- Mustanir, A. (2017). Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Di Kelurahan Kanyuara Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang. *Jurnal Politik Profetik*, 5(2), 247-261.
- Nurkhalis, N. (2018). Bangunan Pembentukan Teori Konstruksi Sosial Peter L Berger: Teori Pembedah Realitas Ganda Kehidupan Manusia. *Community: Pengawas Dinamika Sosial*, 4(1), 74-89.
- Noviawati, E. (2018). Landasan Konstitusional Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal ilmiah galuh justisi*, 6(1), 53-62
- Pamuji, K. D., Aziz, N. A., & Riswari, R. A. (2017). Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Penyusunan Peraturan Desa. *Jurnal Idea Hukum*, 3(1), 493-570
- Prasetya, A. F. (2016). Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Mewujudkan Pembentukan Peraturan Desa yang Partisipatif di Kabupaten Lampung Timur. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(3). 413-432
- Rumokoy, N.K (2013) Prinsip-Prinsip Pembentukan Peraturan Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. *Jurnal Hukum Unsrat*, 21(3), 1-12
- Raho, B (2021). *Teori Sosiologi Modern (Edisi Revisi)*
- Redi, A. (2018). *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*.
- Rosidin, Utang. 2019. Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Proses Pembentukan Peraturan Desa Yang Aspiratif. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Universitas Padjadjaran*. (4) 168-184

- Sari, P. A., & Askari, S. (2021). Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang Desa Menurut Prespektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. *Manabia: Journal of Constitutional Law*, 1(1), 95-106.
- Sjarif Amiroedin, 2009. Perundang-Undangan Dasar, Jenis dan Teknik Membuatnya. Jakarta Rineka Cipta.
- Stefanus, K. Y. (2021). Aspek-Aspek Hukum Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Dan Peraturan Desa. *Jurnal Hukum Proyuris*, 3(1), 239-251.
- Sudaryono, 2018. Metodologi Penelitian Jakarta. Kharisma Putra Utama Offset.
- Sugiyono, 2017. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung
- Suneki, S., & Haryono, H. (2012). Paradigma Teori Dramaturgi Terhadap Kehidupan Sosial. *CIVIS*, 2(2).1-10
- Winardi, 2011. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Masyarakat Desa. Jakarta: Nadi Pustaka.
- Yuhandra, E. (2016). Kewenangan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Dalam Menjalankan Fungsi Legislasi (Sebuah Telaah Sosiologis Proses Pembentukan Perdes Di Desa Karamatwangi Kec. Garawangi Kab. Kuningan). *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 61-76

Undang-Undang Republik Indonesia No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Republik Indonesia No 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 111 tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa